

>> LKjIP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

2023

Prepared by
Bagian Organisasi



KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas taufik dan hidayah_Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Bima Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. LKjIP Kabupaten Bima disusun sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Kabupaten Bima Tahun 2023 menyajikan informasi hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisa akuntabilitas kinerja, termasuk menguraikan keberhasilan, permasalahan, serta upaya dalam rangka pencapaian 6 (enam) Tujuan, 10 (Sepuluh) sasaran strategis yang diukur dengan 27 (dua puluh tujuh) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2023.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bima dapat terselenggara dengan baik berkat sinergitas dan kolaborasi berbagai pihak baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi NTB, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima dan Aparatur Sipil Negara serta seluruh elemen masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam upaya memberikan kontribusi positif bagi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bima.

Semoga LKjIP Kabupaten Bima Tahun 2023 ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh Pemerintah terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bima dan menjadi input positif untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah, khususnya di Kabupaten Bima pada tahun-tahun berikutnya.

Bima, 30 Maret 2024 M

25 Sya'ban 1445 H

BUPATI BIMA,

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE

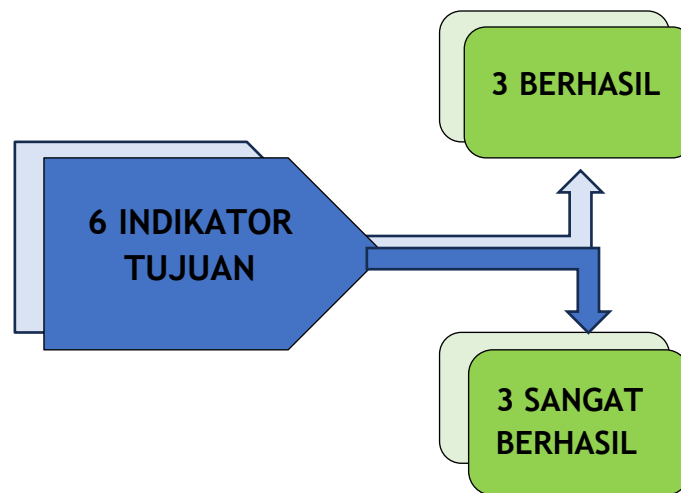
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023

IKHTISAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Bima Tahun 2023 disusun dengan maksud memberikan gambaran informasi mengenai kinerja yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bima pada Tahun 2023. Penilaian atas berhasil tidaknya sebuah kinerja didasarkan pada indikator yang dicapai dan perbandingannya dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

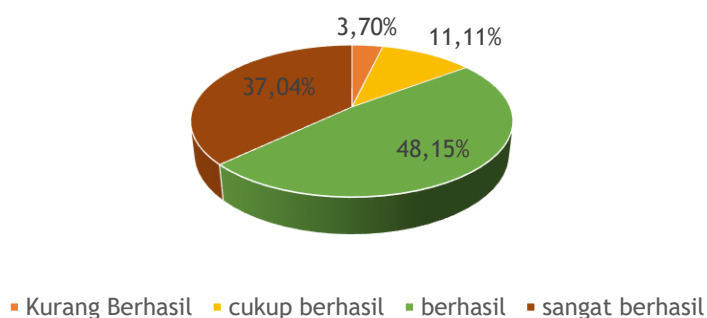
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Bima terdiri atas:

1. Indikator Tujuan sebanyak 6 (enam), berhasil sebanyak 3 (tiga) indikator dan Sangat Berhasil sebanyak 3 (tiga) indikator.



2. Dari 6 tujuan kemudian dijabarkan menjadi 10 sasaran yang diukur melalui 27 indikator kinerja utama. Dari pengelompokan indikator menurut sasaran diperoleh pencapaian sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Utama



1. Sebanyak 1 indikator kinerja utama atau 3.70 % Kurang Berhasil
2. Sebanyak 3 indikator kinerja utama atau 11.11 % Cukup Berhasil.
3. Sebanyak 13 indikator kinerja utama atau 48.15 % Berhasil.
4. Sebanyak 10 indikator kinerja utama atau 37.04 % Sangat Berhasil.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN BIMA	4
1.2 SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN BIMA	4
1.3 SUMBER DAYA MANUSIA	5
1.4 ISU STRATEGIS	7
1.4.1 Masyarakat Yang Beriman, Berilmu Dan Berahlak Mulia	7
1.4.2 Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat	7
1.4.3 Angka Kemiskinan Dan Ketersediaan Lapangan Kerja	8
1.4.4 Aparatur Pemerintah Yang Baik Dan Bersih	11
1.4.5 Kualitas Hidup Masyarakat	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
BAB III KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023	20
3.1 AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA	21
Tujuan 1. Membentuk Masyarakat Yang Beriman, Berilmu Dan Berahlak Mulia	21
Tujuan 2. Meningkatkan Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat	23
Tujuan 3. Menurunkan Angka Kemiskinan Dan Meningkatkan Ketersediaan Lapangan Kerja	25
Tujuan 4. Meningkatkan Ekonomi Daerah Berdaya Saing	29
Tujuan 5. Mewujudkan Aparatur Pemerintah Yang Baik Dan Bersih	33
Tujuan 6. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	37
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN	44
3.4 ANALISIS EFISIENSI	59
BAB IV PENUTUP	61

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN BIMA

Kabupaten Bima merupakan salah satu kabupaten dari 8 (delapan) kabupaten dan 2 (2) kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di ujung timur Pulau Sumbawa. Luas wilayah Kabupaten Bima adalah 438.490 Ha atau 4.389 Km². Secara Administrasi Kabupaten Bima terbagi menjadi 18 Kecamatan, 191 Desa.

Gambar 1.1
Gambaran Umum Kabupaten Bima



1.2 SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

Pemerintah Kabupaten Bima dipimpin oleh Bupati dibantu Wakil Bupati dan Perangkat Daerah. Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Bima sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima. Adapun susunan Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Badan Daerah

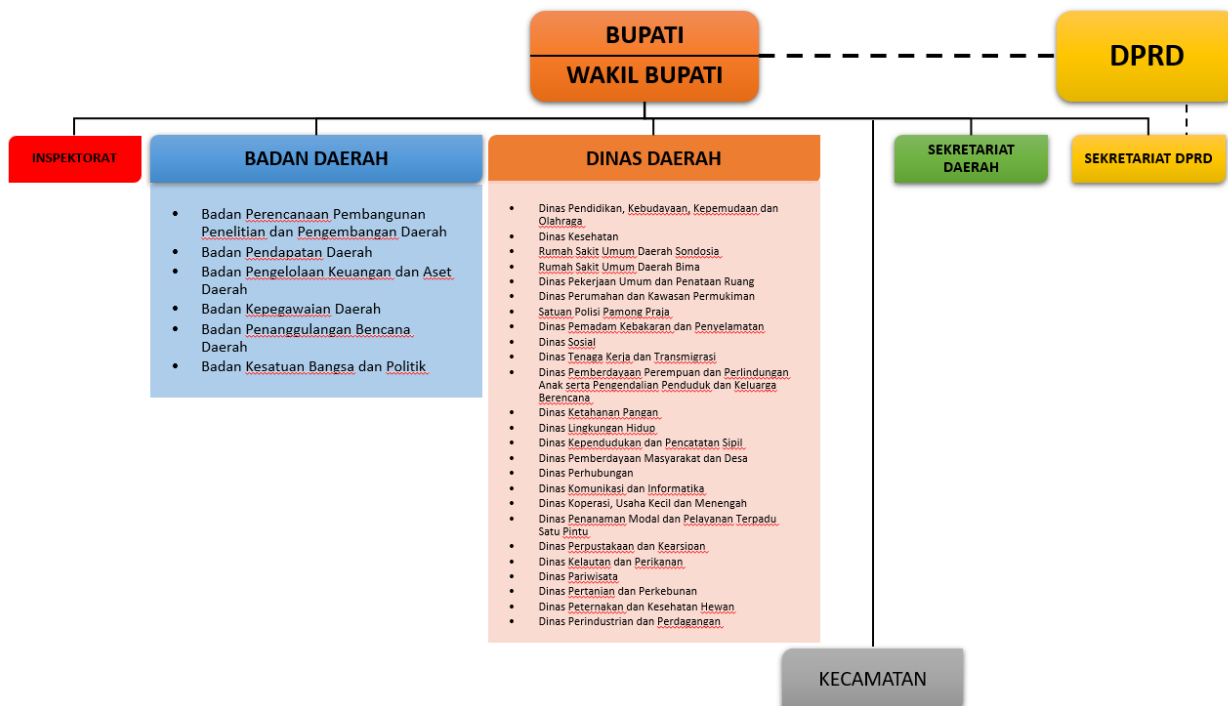
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023

5. Dinas Daerah
6. Kecamatan

Adapun secara lengkap struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Bima Seperti pada bagan berikut :

Gambar 1.2

Bagan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima



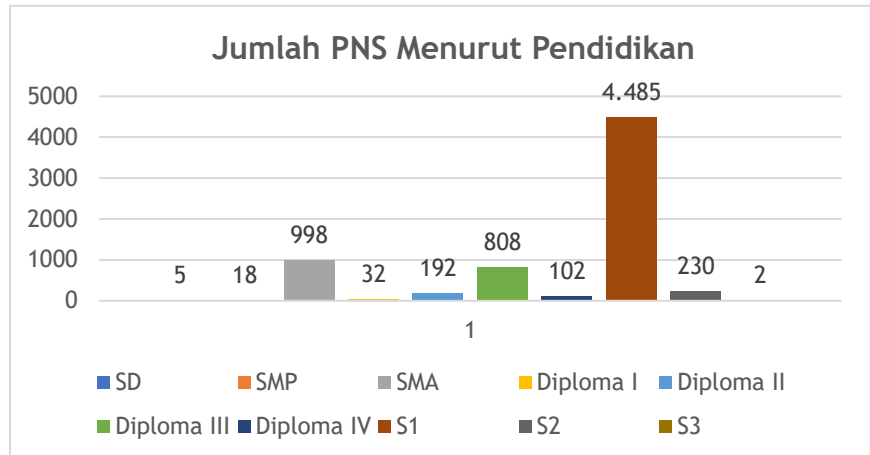
Sumber : Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima

1.3 SUMBER DAYA MANUSIA

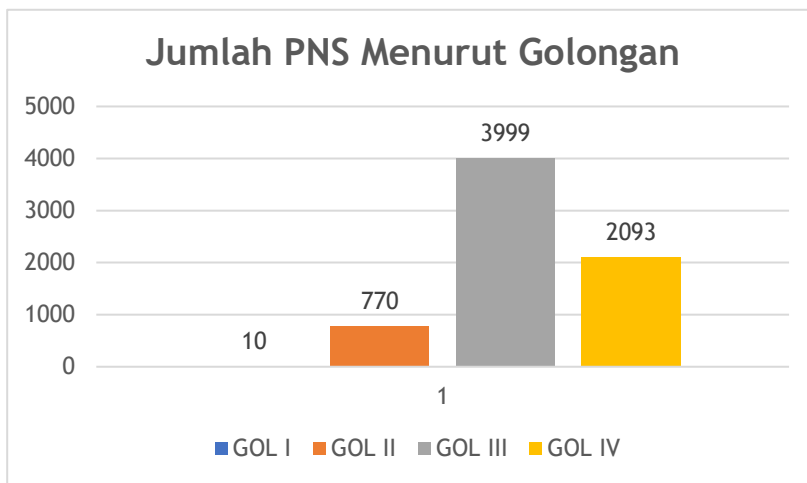
Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah Kabupaten Bima memiliki 6.872 Orang Pegawai Negeri Sipil, Berdasarkan tingkat eselon terdapat 36 orang eselon II, 698 Orang eselon III, 24 orang eselon IV. Sementara berdasarkan jumlah PNS berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan dapat dilihat pada grafik di bawah.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023

Jumlah PNS berdasarkan golongan bervariasi dari lulusan SD hingga perguruan tinggi S3. Jumlah PNS tertinggi pada lulusan S1 sebanyak 4.485 orang, sedangkan untuk jumlah PNS terendah pada PNS lulusan SD sebanyak 5 orang.



Sumber : Bima Dalam Angka, 2023



Sumber : Bima Dalam Angka, 2023

Sementara itu Jumlah PNS menurut golongan pun bervariasi. Jumlah PNS berdasarkan golongan terbanyak pada PNS golongan III sebanyak 3999 orang dan terendah pada PNS golongan I sebanyak 10 orang.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023

1.4 ISU STRATEGIS

1.4.1 Masyarakat Yang Beriman, Berilmu Dan Berahlak Mulia



Masjid Agung Bima

Kabupaten Bima sebagaimana masyarakat Bima sejak zaman kerajaan dan kesultanan-merupakan masyarakat yang religius dan harmonis. Filosofi Maja Labo Dahu yang bermakna tunduk dan takwa kepada Tuhan yang maha esa dan malu melakukan hal buruk terhadap sesama manusia menjadi sendi dasar kehidupan bermasyarakat egaliter yang inklusif dan toleran.

Tantangan zaman dan perubahan global mengharuskan semua pihak untuk terus menumbuhkan dan memelihara sikap ini. Pemerintah Kabupaten Bima menerjemahkannya dalam Visi **Mewujudkan Bima yang RAMAH** yakni Religius menuju masyarakat beriman, berilmu dan berahlak.

1.4.2 Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat

Konflik horizontal yang terjadi antar desa dan kelompok masyarakat di Kabupaten Bima pada umumnya dipicu oleh persoalan pribadi dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian menyeret kelompok dan komunitas yang lebih besar.

Dalam sejarahnya pada wilayah Belo memiliki tradisi "**Ndempa**" atau merupakan suatu kegiatan perkelahian bebas yang dilakukan secara beramai-ramai oleh masyarakat Ngali dan sekitar sebagai cara mengisi usai musim tanam selama 1-2 bulan



Ndempa Ngali Bima

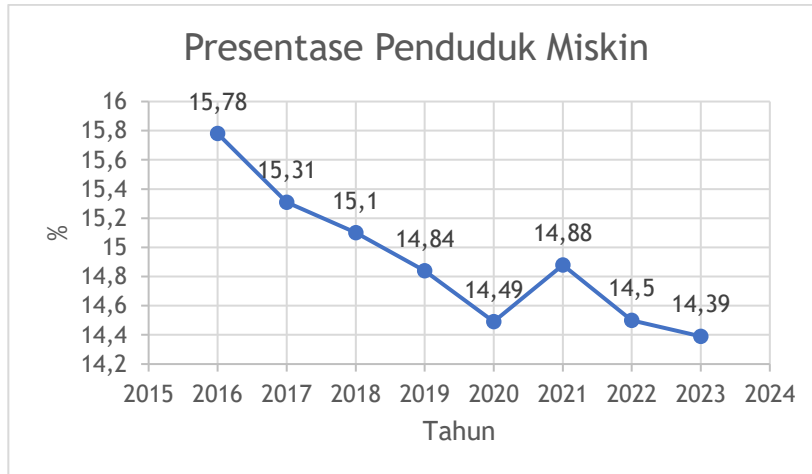
"Pada perkembangannya telah terjadi Transformasi dari ndempa perkelahian tanpa senjata tanpa tujuan menyakiti hanya untuk permainan dan kesenangan menjadi lewa perkelahian dengan senjata" (Mukhlis, 2013)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023

Distorsi penerjamahan dalam tradisi ini menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Upaya penegakan hukum dan pendekatan sosial kultural dilakukan demi terciptanya masyarakat yang sadar hukum dan tertib sosial

1.4.3 Angka Kemiskinan Dan Ketersediaan Lapangan Kerja

Penanggulangan kemiskinan dan upaya penyediaan lapangan kerja yang konsisten sebagai lanjutan dari visi-misi Bima Ramah periode sebelumnya menunjukkan angka kemiskinan yang bergerak turun. Dampak Pandemi Covid-19 sangat besar terhadap jumlah penduduk miskin dan ketersediaan lapangan kerja di Kabupaten Bima, meskipun demikian Pemerintah Kabupaten Bima terus melakukan upaya perbaikan pada laju pertumbuhan ekonomi sehingga mampu menekan jumlah penduduk miskin dan menurunkan tingkat pengangguran pada tahun 2023.



Sumber : BPS Kab. Bima Tahun 2023

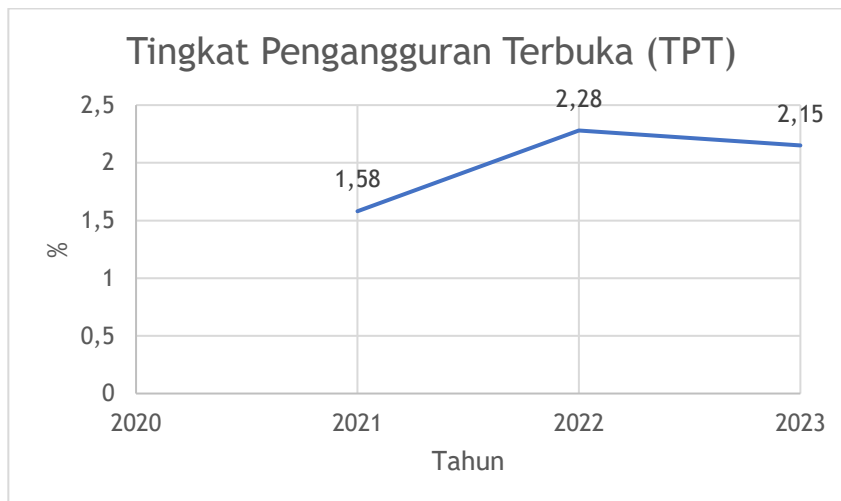
Secara berturut-turut angka kemiskinan turun sejak Tahun 2016 sebesar 15.78% menjadi 14.49% pada tahun 2020. Dampak Pandemi covid yang meluas menyebabkan angka ini naik menjadi 14.88% pada tahun 2021. Namun demikian menurun pada tahun 2022 menjadi 14.50% dan pada tahun 2023 menurun menjadi 14.39 %.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023



Sumber : BPS Kab. Bima Tahun 2023

Kondisi perekonomian Kabupaten Bima dengan potensi ekonominya naik menjadi 3,93 persen di tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bima relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di provinsi NTB sebesar 1,80 persen.



Sumber : BPS Kab. Bima Tahun 2023

Tingkat pengangguran terbuka di Pemerintah Kabupaten Bima mengalami penurunan menjadi 2.15 % dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 2.28 %. Hal ini didukung dengan adanya perluasan kesempatan usaha dan peningkatan kompetensi tenaga kerja yang dilakukan melalui program unggulan sistem pelatihan berbasis kompetensi, pendampingan dan bantuan sarana usaha.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023

Terwujudnya sentra-sentra ekonomi berbasis komoditi unggulan



Angka pengangguran terbuka yang terus menurun sejak tahun 2016 hingga 2023 dari 3.98% menjadi 2.15% merupakan pencapaian yang signifikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bima diarahkan antara lain dengan membuka lapangan kerja penduduk miskin.

Perluasan kesempatan usaha dan peningkatan kompetensi tenaga kerja dilakukan melalui program unggulan sistem pelatihan berbasis kompetensi, pendampingan dan bantuan sarana usaha atau yang dikenal dengan **SI PERKASA PLUS**.

Dalam pengembangan ekonomi berbasis komoditi, sektor pertanian terutama komoditas jagung, padi, dan bawang merah masih menjadi unggulan yang menopang PDRB Kabupaten Bima sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 45 %.



Pengembangan Ekonomi berdaya saing diarahkan pada terpenuhinya infrastruktur dasar sebagai penunjang pengembangan ekonomi yang berbasis tata ruang dan lingkungan difokuskan pada pembangunan dan pengembangan Jalan, jembatan, irigasi pertanian serta prasarana air bersih dan sanitasi untuk perumahan dan kawasan permukiman.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023



Sementara itu untuk **terwujudnya kebijakan yang mempermudah investasi** antara lain dilakukan melalui Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal serta Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

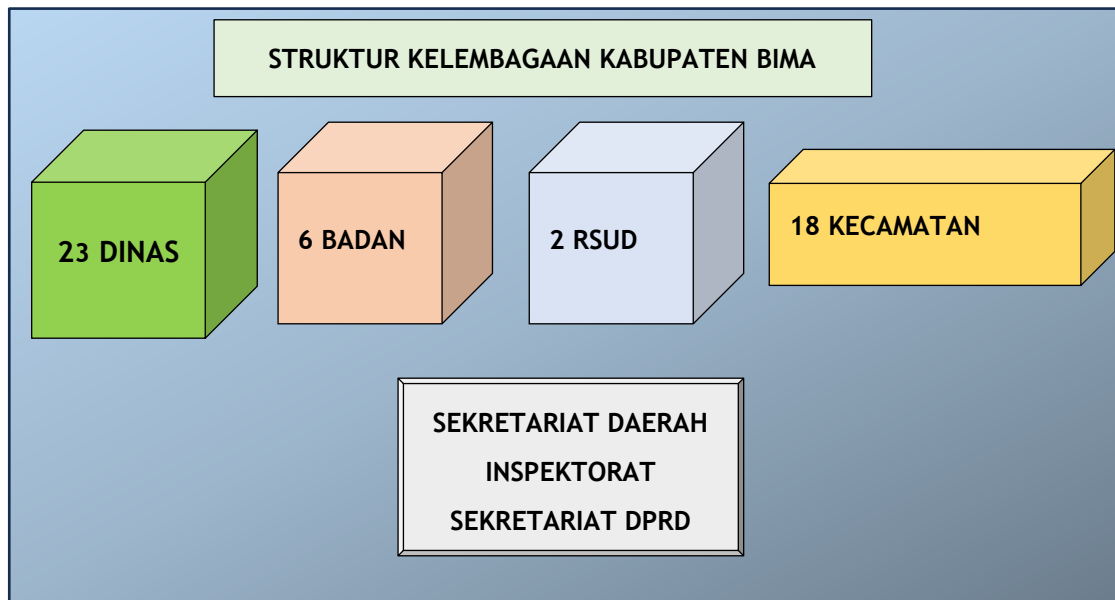


Upaya untuk memberikan akses investasi bagi masyarakat dilakukan melalui meningkatkan edukasi dan literasi keuangan, memfasilitasi/menghubungkan masyarakat dengan perbankan sehingga dapat mengakses produk dan layanan keuangan yang lebih luas dan terjangkau. serta meningkatkan transparansi dan regulasi di sektor investasi,

1.4.4 Aparatur Pemerintah Yang Baik Dan Bersih

Sebagai bentuk peningkatan mutu pelayanan publik yang profesional prima dan berkualitas serta dalam rangka reformasi birokrasi melalui penataan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Bima didasarkan pada Visi-misi Kepala Daerah sesuai dengan arah kebijakan nasional tentang Penyederhanaan Birokrasi dalam rangka memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, menyederhanakan eselonisasi sesuai dengan Amanat aresiden Republik Indonesia yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, Dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaran Jabatan Administrasi Ke dalam Jabatan Fungsional.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023



Adapun Perubahan struktur terjadi pada jumlah Perangkat Daerah dari 50 menjadi 52 Perangkat Daerah dengan penambahan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Badan Pendapatan Daerah. Serta perubahan struktural pada sebagian eselon IV yang disetarakan menjadi tenaga fungsional.

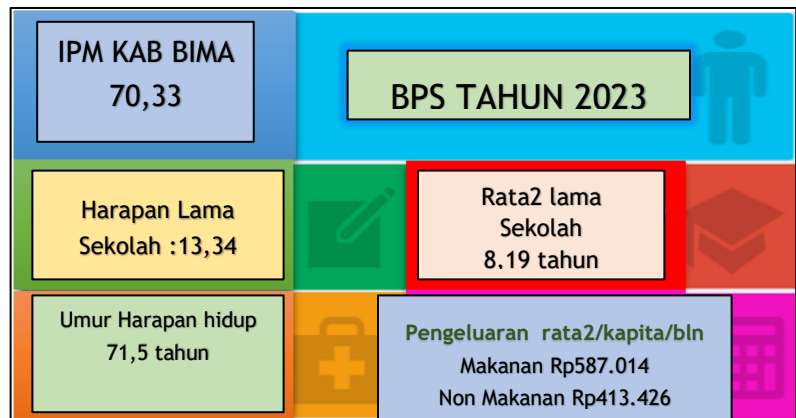
Upaya peningkatan mutu pelayanan publik yang profesional prima dan berkualitas juga dilakukan melalui seleksi CPNS berbasis Computer Assisted Test (CAT) guna membangun pondasi aparatur pemerintah yang baik dan bersih dan Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023

1.4.5 Kualitas Hidup Masyarakat

Pasca pandemi covid-19 kegiatan/event kepemudaan dan olahraga masih belum dapat diselenggarakan secara optimal. Namun demikian berbagai pembinaan dan pendampingan tetap dilakukan secara parsial menyesuaikan dengan kondisi yang ada.



Sumber : BPS Kabupaten Bima Tahun 2023

Pembangunan bidang kesehatan dilakukan dengan meningkatkan sarana prasana pelayan berupa pengembangan RSUD dan Pusat Kesehatan Masyarakat serta dengan memberikan pelayan medis dan paramedis yang berkualitas. Terdapat 23 Dokter spesialis yakni; anak, gigi, anastesi, bedah, bedah mulut, mata, penyakit dalam, obgyn, patologi klinik, radiologi, rehab medik, syaraf, THT, dan jantung yang memberikan pelayanan kesehatan guna peningkatan kualitas hidup Masyarakat.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023

Pemerintah Kabupaten Bima terus melakukan perbaikan kualitas hidup masyarakatnya melalui peningkatan pelayanan di berbagai bidang. Hal ini terbukti dengan diraihnya penghargaan-penghargaan oleh Pemerintah Kabupaten Bima pada tahun 2023, yaitu :

1. Pada sisi inovasi Kabupaten Bima meraih Top 99 pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Kemenpan RB melalui inovasi Desa Unggul.
2. Penghargaan atas keberhasilan dalam penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Tahun 2023 dari Bupati Bima
3. Penghargaan atas keberhasilan dalam penilaian Kepatuhan penyelenggaraan pelayanan public Kabupaten Bima mendapatkan nilai 86,65 kategori B (zona hijau) dari Ketua Ombudsman RI
4. Penghargaan atas prestasi pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan public kategori Pelayanan Barang Tahun 2023 dari Bupati Bima
5. Penghargaan sebagai Pembina Tagana Terbaik atas komitmen dukungan dan pembinaan terhadap TAGANA Kabupaten Bima dari Gubernur NTB
6. Juara III lomba manajemen Shelter Tagana NTB Tahun 2023
7. Penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak Kategori Pratama dari Menteri Pendayagunaan Aparatur RB RI
8. Kabupaten Bima meraih penghargaan Tingkat nasional yaitu Anugerah Meritokrasi 2023 dari KASN
9. Penghargaan juara I Pelayanan KB terbanyak pada Momentum Peringatan Hari Ibu ke-95 Tahun 2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Kabupaten Bima Tahun 2023 berdasarkan Visi dan Misi pembangunan daerah yang merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2021 – 2026.

VISI Pembangunan Daerah Kabupaten Bima Tahun 2021 – 2026 Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE dan Wakil Bupati Bima H. Dahlan M. Noer yaitu :

TERWUJUDNYA KABUPATEN BIMA YANG RAMAH

“RELIGIUS, AMAN, MAKMUR, AMANAH DAN HANDAL”

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan daerah dijabarkan dalam 5 Misi dan Prioritas Pembangunan sebagai berikut :

- 1



Mewujudkan Masyarakat yang Memahami dan Mengamalkan Nilai-nilai Keagamaan serta Nilai-nilai Luhur Kebudayaan Bima

Prioritas Pembangunan

 1. Memperkuat Karakter masyarakat Bima yang Religius melalui Peningkatan Kegiatan-Kegiatan Keagamaan

- 2



Mewujudkan Masyarakat Yang Kondusif Dan Harmonis Dengan Mengedepankan Prinsip Hak Asasi Manusia

Prioritas Pembangunan

 2. Mendorong Terciptanya Kondisi Masyarakat yang Aman dan Harmonis

- 3



Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berdaya Saing Dan Kesejahteraan Masyarakat

Prioritas Pembangunan

 3. Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pertambangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkelanjutan
 4. Membangun Kawasan Pariwisata Prioritas, Kawasan Ibukota Kabupaten dan Kawasan Strategis Lainnya untuk Percepatan Pengembangan Wilayah
 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup untuk memperkuat Mitigasi Bencana

- 4



Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan Dan Akuntabel

Prioritas Pembangunan

 6. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Melayani

- 5



Membangun SDM Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing Dan Inovatif Dengan Pengarusutamaan Kesetaraan Gender

Prioritas Pembangunan

 7. Meningkatkan Daya Saing SDM Kab Bima Yang Sehat dan Unggul

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja Kabupaten Bima Tahun 2023 sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Bima yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2021-2026. Adapun target capaian kinerja ditetapkan melalui 6 (enam) Tujuan dan Indikator Tujuan, 10 (sepuluh) Sasaran Strategis serta 27 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

TUJUAN STRATEGIS I

Membentuk Masyarakat yang Beriman, Berilmu dan Berahlak Mulia

- Indikator Tujuan : Indeks Kerukunan Beragama
- Target : 89.33 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target
1.	Terwujudnya sikap perilaku keagamaan yang inklusif toleran dan egaliter	1. Terbangun Masjid Agung Bima Sebagai Pusat Kajian Keagamaan dan Budaya Bima	%	100
		2. Persentase Tempat Ibadah sebagai Tempat Kajian Keagamaan Kecamatan dan	%	3.51

TUJUAN STRATEGIS II

Meningkatkan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

- Indikator Tujuan : Persentase Menurunnya Pelanggaran Ketertiban
- Target : 50 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target
2.	Terciptanya masyarakat yang sadar hukum dan tertib social	3. Jumlah Desa Sadar Hukum	Desa	8

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023**

TUJUAN STRATEGIS III

Menurunkan Angka Kemiskinan dan Meningkatkan Ketersediaan Lapangan Kerja

➤ Indikator Tujuan : Persentase Penduduk Miskin

Target : 13.30

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target
3.	Terbentuknya sentra-sentra ekonomi berbasis komoditi unggulan	4. Pertumbuhan Ekonomi Daerah	%	5.03
		5. Kontribusi PDRB Sektor Komoditas Unggulan	%	46
		6. Skor Pola Pangan Harapan	Point	83.56
		7. Gini Rasio	Point	0.28

TUJUAN STRATEGIS IV

Meningkatkan Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing

➤ Indikator Tujuan : Tingkat Pengangguran Terbuka

Target : 4.30 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target
4.	Terpenuhinya infrastruktur dasar sebagai penunjang pengembangan ekonomi yang berbasis tata ruang dan lingkungan	8. Persentase Kemantapan Jalan	%	59
		9. Persentase Irigasi yang Berfungsi Baik	%	49
		10. Cakupan Akses Rumah Tangga Terlayani Air Bersih	%	88
		11. Cakupan Akses Rumah Tangga Terlayani Sanitasi Layak	%	88.5
		12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	63.84
		13. Tingkat Kapasitas Penanggulangan Bencana	%	68

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target
5.	Terwujudnya kebijakan yang mempermudah investasi	14. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	14

TUJUAN STRATEGIS V

Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Baik dan Bersih

- Indikator Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi
Target : CC

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target
6.	Terciptanya pelayanan publik yang professional prima dan berkualitas	15. Opini BPK	Opini	WTP
		16. Nilai Sakip	Opini	B
		17. Tingkat Persentase Pencegahan Korupsi	%	85
		18. Indeks Keterbukaan Informasi	%	85

TUJUAN STRATEGIS VI

**Membangun SDM yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, dan Inovatif dengan
Pengarusutamaan Kesetaraan Gender**

- Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia
Target : 67.65

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target
7.	Meningkatnya kualitas Pendidikan pemuda dan olahraga	19. Angka Melek Huruf	%	98.07
		20. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7.84
		21. Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.34

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target
		22. Prestasi Kepemudaan Tingkat Provinsi dan Nasional	Orang	8
		23. Prestasi Atlet Tingkat Provinsi dan Nasional	Orang	11
8.	Meningkatnya kualitas Kesehatan	24. Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	72.93
		25. Prevalensi Balita Stunting	%	20.5
9.	Terwujudnya Masyarakat yang inovatif	26. Indeks Inovasi Daerah	Point	40
10	Terwujudnya pembangunan yang inklusif dan setara	27. Indeks Pembangunan Gender	Point	94

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023

BAB III

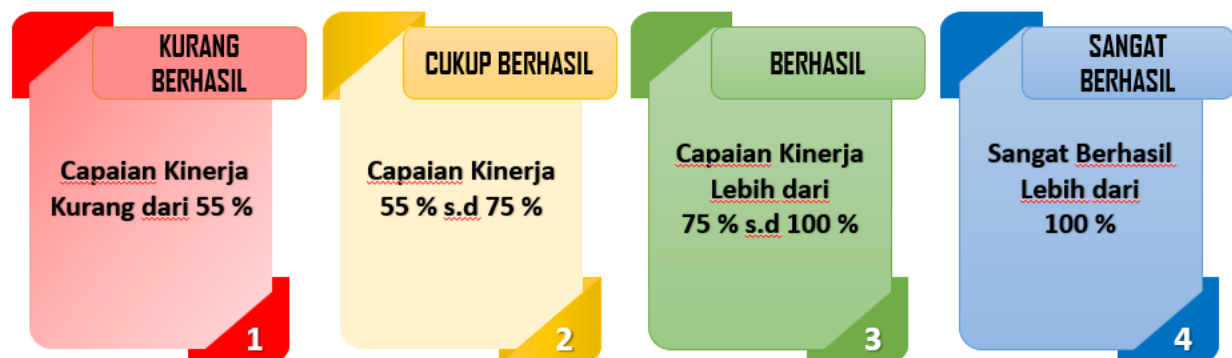
KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023

3.1 AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan tanggung jawab Instansi Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, mengacu pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Bima berdasarkan tingkat pencapaian indikator tujuan dan indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sebagai bagian dari proses pengendalian pelaksanaan pembangunan untuk mengetahui keberhasilan Visi dan Misi Kabupaten Bima sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2021 - 2026 .

Pencapaian tujuan dan sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja, kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Bima.

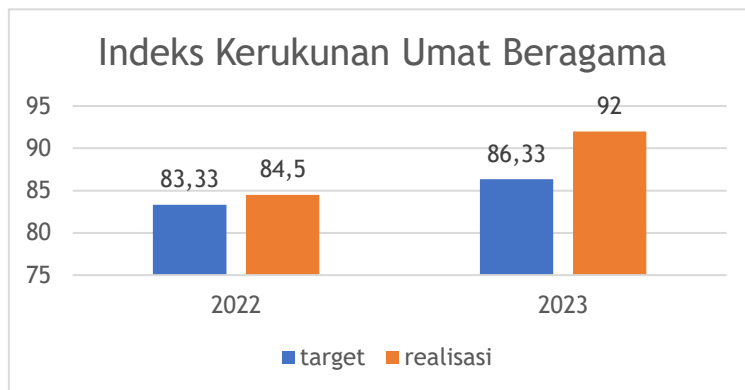
Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

TUJUAN 1. Membentuk Masyarakat Yang Beriman, Berilmu Dan Berahlak Mulia



Capaian 2023
106,57 %
SANGAT BERHASIL

Target Capaian
Akhir RPJMD 2026
96,33

Indeks Kerukunan Umat Beragama diukur berdasarkan keadaan hubungan umat bergama yang dilandasi toleransi, kerjasama dan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat.

Realisasi indikator tujuan Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bima sebesar 92% dari target 86.33% dengan capaian kinerja 106.57% (Sangat Berhasil). Dalam rangka menumbuhkan Toleransi dan Kerukunan antar umat beragama Pemerintah Kabupaten Bima bersama Kementerian Agama RI Kabupaten Bima membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai koordinator dan fasilitator guna meningkatkan toleransi antar umat bergama dengan melaksanakan kegiatan dialog agama antar tokoh masyarakat, serta menampung dan menyalurkan aspirasi.

SASARAN KE - 1 Terwujudnya Sikap Perilaku Keagamaan Yang Inklusif Toleran Dan Egaliter

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Ket
Terbangunnya Masjid Agung Bima Sebagai Pusat Kajian Keagamaan dan Budaya Bima	100 %	100 %	100 %	Berhasil
Persentase Tempat Ibadah sebagai Tempat Kajian Keagamaan Kecamatan dan Desa	3.51 %	100 %	2849 %	Sangat Berhasil

Sumber : Sekretariat Daerah dan Dinas PUPR, 2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023

Keberhasilan pencapaian indikator sasaran Terbangun Masjid Agung Bima Sebagai Pusat Kajian Keagamaan dan Budaya Bima pada tahun 2023 mencapai 100% dengan telah terbangunnya masjid agung Kabupaten Bima yang digunakan sebagai pusat kajian dan dakwah.

Sedangkan realisasi indikator Persentase Indikator Sasaran Tempat Ibadah sebagai Tempat Kajian Keagamaan Kecamatan dan Desa mencapai 100 %, dengan capaian kinerja 2849 %. Capaian ini jika dibandingkan dengan capaian 2022 sebesar 2.75% maka angka ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Peningkatan capaian ini didukung dengan adanya kegiatan majelis taklim di Tingkat kecamatan dan desa serta adanya pembinaan terhadap jumlah pesantren dan organisasi keagamaan yang dibina.

Pembangunan Bidang Agama di Kabupaten Bima merupakan upaya untuk mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama, Secara umum tujuan pembangunan kesadaran dan pemahaman kehidupan beragama di Kabupaten Bima telah didukung melalui Pembangunan Sarana dan Prasarana Keagamaan dan bantuan operasional berupa Pembangunan 1.017 unit Masjid/ Mushola, 1.138 buah TPQ, 191 Majelis Ta'lim, 1.138 Guru Ngaji, 2.484 Imam Marbot, 353 Dai, dan 100 Pondok Pesantren. Pencapaian sasaran ini didukung dengan anggaran sebesar Rp18.074.023.565 yang terealisasi sebesar Rp17.709.802.106.



MTQ Kab. Bima



Kegiatan Keagamaan Kab. Bima

Program penunjang yang mendukung pencapaian indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
2. Program Pembinaan Perpustakaan
3. Program Pengembangan Kebudayaan
4. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

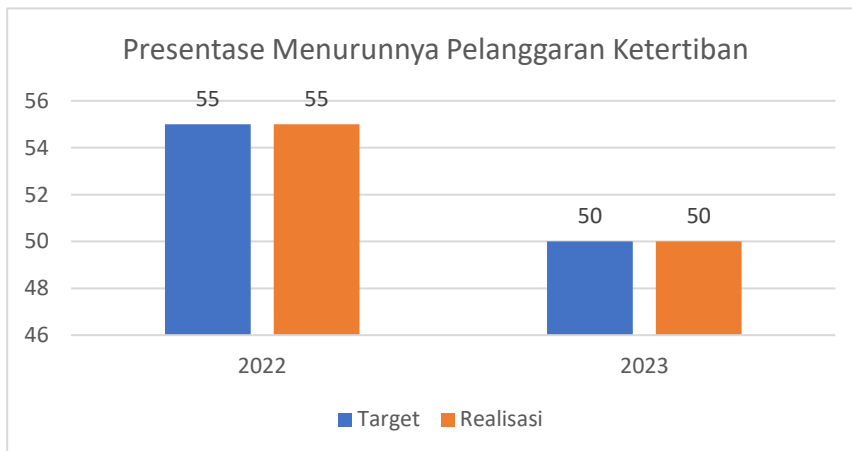
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023

5. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Bentuk dukungan kegiatan antara lain :

1. Lanjutan pembangunan masjid agung;
2. Perpustakaan masjid agung/ Literasi keagamaan;
3. Pembinaan majelis dan orso;
4. Pelaksanaan GPS (Gerakan Pesantren Sehari)/ Gerakan Toile Bersih;
5. Jum'at Khusus;
6. Imtag gabungan tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat perangkat daerah;
7. Diklat Guru Ngaji, Da'l;
8. Penyelenggaraan MTQ dan STQ Kecamatan, Kabupaten, Provinsi;
9. Pemberian insentif guru ngaji, marbot, da'l, bilal dan pengurus rumah ibadah lainnya melalui dana desa.

TUJUAN 2. Meningkatkan Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat



Capaian 2023
100 %
BERHASIL

Target Capaian
Akhir RPJMD 2026
35 %

Realisasi Indikator Persentase Menurunnya Pelanggaran Ketertiban Tahun 2023 adalah 50 % dari target 50 % dengan capaian kinerja 100% (Berhasil). Capaian ini berhasil turun 5% dari capaian Tahun 2022 yaitu sebesar 55%.

Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibmas mencakup ketentraman dan ketertiban umum melalui Pedagang kaki lima, penambang galian C tanpa ijin, penyerobotan tanah pemerintah, pencurian dan aksi premanisme, prostitusi, gelandangan dan pengemis di persimpangan jalan maupun pusat-pusat keramaian.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023

Pencapaian indikator tujuan dilaksanakan juga melalui pelaksanaan pencegahan dini dan penanggulangan konflik dengan melakukan kegiatan dialog dan pertemuan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan lainnya yang merupakan mitra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bima.

SASARAN KE - 2 Terciptanya Masyarakat Yang Sadar Hukum Dan Tertib Sosial

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Ket
Jumlah Desa Sadar Hukum	8 Desa	191 Desa	2387,5 %	Sangat Berhasil

Sumber : Satpol PP Tahun 2023

Capaian Kinerja terhadap sasaran terciptanya masyarakat desa yang sadar hukum dan tertib sosial mencapai realisasi 191 desa dari target 8 desa dengan capaian 2387,5 % (sangat berhasil). Capaian ini sama dengan hasil pencapaian tahun 2022 yaitu sebanyak 191 desa. Pencapaian sasaran ini didukung dengan anggaran sebesar Rp21.745.175.780 yang terealisasi sebesar Rp21.189.606.830.

Capaian ini didukung melalui integrasi program:

1. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
3. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat



program ini terdapat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Kesbangpolinmas, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Bagian Kesra Setda Bima. Upaya Perbaikan Kinerja untuk menunjang Pemerintah Kabupaten Bima adalah melanjutkan upaya tahun 2022 yakni:

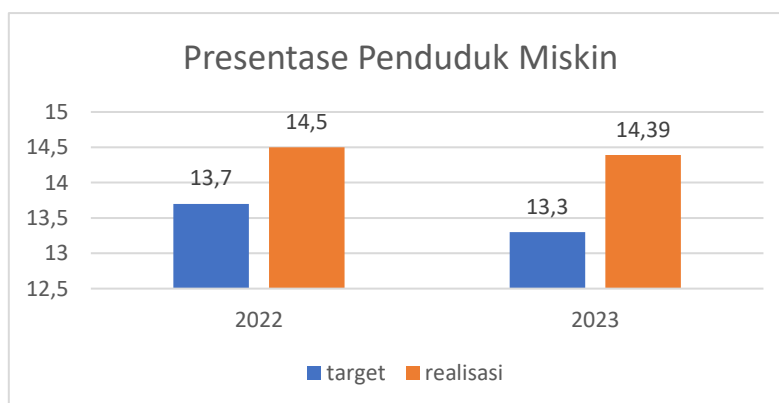
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023

1. Bekerjasama dengan aparat keamanan khususnya Polri dan TNI dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Melakukan pembinaan pada kepada Pemerintah Desa dan masyarakat dalam upaya mengimplementasikan 4 Dimensi Kriteria Desa Sadar Hukum yaitu Dimensi Akses Informasi Hukum, Dimensi Implementasi Hukum, Dimensi Akses Keadilan dan Dimensi Demokrasi dan Regulasi
3. Upaya pembinaan dan sosialisasi dilaksanakan secara kolaboratif bersama Pemerintah Kecamatan, Babinsa, Bhabinkabtimas dengan melakukan pendekatan internal pada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh-tokoh lainnya.



Sebagai hasilnya selama tahun 2023, di Kabupaten Bima tidak terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada konflik yang melanggar hukum, SARA, separatisme dan anarkisme. Gangguan yang terjadi sangat bersifat lokal dan individual yang secara keseluruhannya masih mampu diselesaikan oleh masyarakat sendiri maupun aparat pemerintah mulai tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

TUJUAN 3. Menurunkan Angka Kemiskinan Dan Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja



Capaian 2023

92,43 %

BERHASIL

Target Capaian
Akhir RPJMD 2026

12 %

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023

Usaha pemerintah Kabupaten Bima dan masyarakat untuk terus mengentaskan kemiskinan makin menunjukkan hasil positif dari tahun ketahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat presentase kemiskinan di Kabupaten Bima pada tahun 2022 sebesar 14,5% menurun menjadi 14,39% atau turun sebesar 0,11% pada tahun 2023 dengan capaian kinerja 92,43% (Berhasil), atau jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 sebesar 74.740 orang dari total penduduk 535.530 orang.

Capaian di atas menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan sebesar 0,11% dari capaian Kabupaten Bima pada tahun 2022 meskipun capaian ini masih dibawah target RPJMD 2023 dengan selisih 1,09 %. Meski secara nasional terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin pasca pandemi Covid-19 namun hal tersebut dapat ditekan. Pemberian bantuan sosial melalui Jaringan Pengaman Sosial (JPS) yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bima dapat menekan dampak dari pandemi Covid-19, terutama kepada kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), agar dapat tumbuh dan mandiri kembali pasca pandemi. Selain itu juga adanya peningkatan PDRB pada sektor komoditi unggulan menjadi pemicu meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima.



Adapun hambatan/ kendala yang terjadi dalam pencapaian ini terkait dengan updating Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Bima yang belum terupdate secara berkala, selain itu masih adanya *mindset negative* dari masyarakat yang menganggap bantuan yang diberikan pemerintah sebagai rejeki, akibatnya walaupun secara realita penerima manfaat tersebut sudah mampu dan mandiri tetapi tetap berharap bantuan dari pemerintah sehingga tidak mau keluar dari DTKS.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023**

SASARAN KE - 3 Terbentuknya Sentra-Sentra Ekonomi Berbasis Komoditi Unggulan

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Ket
Pertumbuhan ekonomi daerah	5,03 %	3,93 %	78,13 %	Berhasil
PDRB kontribusi sektor komoditas unggulan	46 %	44,90 %	97,61 %	Berhasil
Skor pola pangan harapan	83,56 poin	80,30 poin	96,10 %	Berhasil
Rasio gini	0,20 poin	0,16 poin	78,65 %	Berhasil

Sumber : BPS, Setda dan BAPPEDA Tahun 2023

Empat indikator Capaian Kinerja sasaran terbentuknya sentra-sentra ekonomi berbasis komoditi unggulan menunjukkan capaian kinerja secara keseluruhan yang berhasil. Pada pertumbuhan ekonomi daerah mencapai realisasi 3,93 % dengan capaian 78,13 %, PDRB kontribusi sektor komoditas unggulan terealisasi sebesar 44,90 % dengan capaian 97,61%, Skor pola pangan harapan terealisasi 80,30 poin dengan capaian 96,10 %, dan Rasio gini terealisasi 0,16 atau capaian 78,65 %. Jumlah anggaran yang menopang sasaran ini sebesar Rp110.149.907.352 dan telah terealisasi sebesar Rp107.973.238.033.

Keberhasilan sasaran ini didukung oleh 3 sektor utama penunjang PDRB yaitu pertama sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, kedua perdagangan besar dan eceran, serta ketiga administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan social wajib, dimana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mendominasi sebesar 45 % berupa komoditas pertanian unggulan seperti : jagung, padi, kacang, bawang merah, ayam dan sapi potong. Kemudian adanya kegiatan yang menunjang distribusi dan percepatan penjualan bawang merah dengan melakukan Kerjasama antardaerah seperti Muna Barat.

Program penunjang yang mendukung pencapaian indicator ini adalah :

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
3. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi
4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023**

5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
7. Program Pengembangan UMKM
8. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
9. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
10. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
11. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
12. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
13. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
14. Program Penyuluhan Pertanian
15. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
16. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
17. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
18. Program Penyuluhan Pertanian
19. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
20. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
21. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
22. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
23. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
24. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
25. Program Pemasaran Pariwisata
26. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
27. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
28. Program Perekonomian Dan Pembangunan
29. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
30. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
31. Program Penanganan Kerawanan Pangan
32. Program Pengawasan Keamanan Pangan
33. Program Pemberdayaan Sosial
34. Program Rehabilitasi Sosial
35. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
36. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
37. Program Penempatan Tenaga Kerja

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023

- 38. Program Hubungan Industrial
- 39. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Upaya Perbaikan Kinerja untuk menunjang pencapaian tujuan ini kedepan dilakukan antara lain dengan:

1. Menyelaraskan program pengentasan kemiskinan lintas sektor baik di Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, Dinas Pertanian dan tanaman Pangan, Dinas Perikanan dan Kelautan serta Dinas Ketahanan Pangan.
2. Mengembangkan Program unggulan Si Perkasa Plus (Sistem Pelatihan Berbasis Kompetensi, Pendampingan Dan Bantuan Sarana Usaha) melalui Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan memperluas cakupan peserta pelatihan, jaringan dunia usaha dan ragam jenis pelatihan.
3. Memberikan reward / insentif kepada UMKM yang dapat menyerap tenaga kerja dan Mendorong penciptaan kesempatan kerja baru;
4. Memfasilitasi kewirausahaan UMKM agar lebih maju dan berkembang agar mendapatkan akses pinjaman kepada perbankan;

TUJUAN 4. Meningkatkan Ekonomi Daerah Berdaya Saing



Capaian 2023
200 %
SANGAT BERHASIL

Target Capaian
Akhir RPJMD 2026
3,50 %

Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Bima mengalami penurunan dari 2,28 % pada tahun 2022 menjadi 2,15 % pada tahun 2023. Pada tahun 2023 target tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,3 % dan terealisasi sebesar 2,15 % atau dengan capaian sebesar 200% (sangat berhasil). Capaian ini sudah melebihi target yang direncanakan pada tahun 2023, ini menunjukkan bahwa secara umum kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Bima pada tahun 2023 memperlihatkan kinerja yang masih kuat dengan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 293.494

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023**

orang, sementara jumlah pengangguran hanya sebesar 6.439 orang yang didominasi oleh penduduk laki-laki, yaitu sebanyak 5.131 orang.

**SASARAN KE - 4 Terpenuhinya Infrastruktur Dasar Sebagai Penunjang Pengembangan
Ekonomi Yang Berbasis Tata Ruang Dan Lingkungan**

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Ket
Persentase kemantapan jalan	59,00	54,15	91,78	Berhasil
Persentase jaringan irigasi berfungsi baik	49,00	57,35	117,04	Sangat Berhasil
Cakupan akses rumah tangga terlayani air bersih	88	92,15	104,72	Sangat Berhasil
Cakupan rumah tangga terlayani sanitasi layak	88,5	94,99	107,34	Sangat Berhasil
Indeks kualitas lingkungan hidup	63,84	66,48	104,14	Sangat Berhasil
Tingkat kapasitas penanggulangan bencana	68	63	92,65 %	Berhasil

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, dan Dinas PUPR, 2023

Dari 6 indikator utama capaian kinerja terpenuhinya infrastruktur dasar sebagai penunjang pengembangan ekonomi yang berbasis tata ruang dan lingkungan 4 di antara melampaui target di atas 100% atau sangat berhasil, 2 indikator yakni presentase kemantapan jalan dan tingkat kapasitas penanggulangan bencana mencapai target berturut-turut 91,78 % dan 92.65% atau berhasil. secara keseluruhan capaian target ini naik dari target tahun 2022. Pencapaian sasaran ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 130.010.472.233 dan terealisasi sebesar Rp123.960.666.138. Hal ini menunjukan bahwa upaya untuk mencapai sasaran terpenuhinya infrastruktur dasar sebagai penunjang pengembangan ekonomi yang berbasis tata ruang dan lingkungan telah sesuai dengan yang diharapkan.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023

Adapun penjelasan terinci mengenai capaian indikator sasaran ke-4 sebagai berikut :

1. Persentase Kemantapan Jalan

Tahun 2022 total panjang jalan Kabupaten Bima yang menghubungkan antar kecamatan sepanjang 831.611 km, dengan panjang kondisi jalan mantap adalah sepanjang 475,906 km atau 57,23 %. sedangkan pada tahun 2023 capaian kondisi jalan mantap adalah sepanjang 450,35 km atau 54.15% dari total panjang jalan 831,611 km.

2. Persentase Jaringan Irigasi Berfungsi Baik

Pada tahun 2022 luas daerah irigasi yang berfungsi baik hanya seluas 6.074 Ha dari luas jaringan irigasi 17.370 Ha. Sementara pada tahun 2023, luas daerah irigasi yang berfungsi baik adalah 9.961 Ha dari Luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Bima 17.370 Ha, sehingga persentase kondisi infrastruktur irigasi yang berfungsi baik berkisar 57.35%.

3. Penyediaan Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak

Untuk indikator kinerja cakupan akses terhadap rumah tangga terlayani air bersih, capaian kinerja tahun 2023 adalah sebesar 107,34 %. Keberhasilan ini didukung oleh kelanjutan program pemerintah Kabupaten Bima dalam penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL). Disamping, dukungan program Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang ditujukan untuk meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target tujuan pembangunan milenium (MDGs) melalui sektor air minum dan sanitasi.

Upaya perbaikan juga dilakukan melalui implementasi Lima Pilar STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) yakni stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengolahan air minum dan makanan dengan benar, pengelolaan sampah rumah tangga. dan pengelolaan limbah cair rumah tangga agar tidak mencemari lingkungan.

4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bima tahun 2023 mencapai 68,86, capaian ini cukup berhasil jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan secara nasional yaitu 66,50-68,50 Nilai IKLH Kabupaten didapatkan dari 3 Indikator yaitu :

- a. Indeks Kualitas Udara sebesar 35.57
- b. Indeks Kualitas Air sebesar 18.8
- c. Indeks Kualitas Tutupan Hutan 14.49

Sebagai Upaya meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bima melaksanakan pemantauan melalui *Online and Realtime Monitoring* (Onlimo) KLHK.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023

5. Tingkat Kapasitas Penanggulangan Bencana

Persentase tingkat Kapasitas Penanggulangan Bencana di tahun 2023 adalah sebesar 63 % meningkat jika dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 56 %. Pencapaian ini didukung oleh BPBD Kabupaten berhasil memetakan wilayah rawan bencana untuk 12 kawasan rawan bencana yang akan digunakan sebagai bahan pengambil keputusan untuk bertindak dalam masa sebelum bencana, antara lain terkait: kajian lokasi rawan bencana, manajemen bencana, mitigasi berbagai resiko bencana, evakuasi dan penyelamatan, dan pengembangan wilayah pesisir. Disamping



penyiapan peta lokasi rawan bencana, BPBD Kabupaten Bima melaksanakan kegiatan apel siaga dan simulasi penanggulangan bencana bersama TNI, Polri, Sar dan lintas sektor.

Program penunjang untuk indikator terpenuhinya infrastruktur dasar sebagai penunjang pengembangan ekonomi yang berbasis tata ruang dan lingkungan adalah:

1. Program Penyelenggaraan Jalan
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
6. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
7. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
9. Program Pengelolaan Persampahan
10. Program Penanggulangan Bencana
11. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
12. Program Penanganan Bencana
13. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
14. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023

SASARAN KE - 5 Terwujudnya Kebijakan Yang Mempermudah Investasi

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Ket
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	14	14	100 %	Berhasil

Sumber: DPMPSTSP Tahun 2023

Pencapaian kinerja sasaran ke - 5 terwujudnya kebijakan yang mempermudah investasi mencapai 100% dengan target jumlah 14 investor. jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebanyak 12 investor maka capaian ini cukup signifikan. Pencapaian keberhasilan sasaran ini didukung dengan anggaran sebesar Rp1.258.700.000 dan yang terealisasi sebesar Rp1.167.899.188.

Indikator ini didorong melalui Program :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Upaya perbaikan kinerja untuk menunjang terwujudnya kebijakan yang mempermudah investasi antara lain dilakukan melalui:

1. Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal
2. Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal.
3. Peningkatan kualitas layanan *online* dan *offline* melalui sistem layanan satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu.

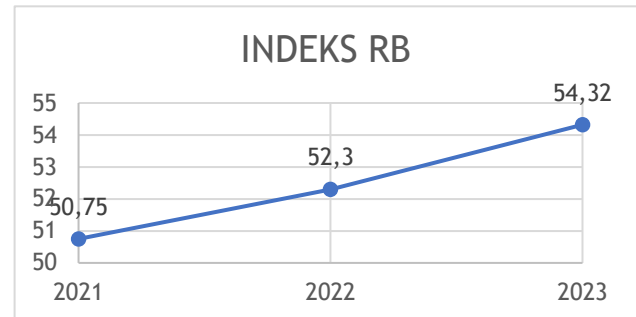
TUJUAN 5. Mewujudkan Aparatur Pemerintah Yang Baik Dan Bersih

	Target	Realisasi
Tahun 2022	C	C
Tahun 2023	CC	CC

Capaian 2023
100 % (BERHASIL)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023

Indeks reformasi birokrasi Kabupaten Bima terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 nilai indeks RB 50,75 kemudian meningkat menjadi 52,3 Tahun 2022, dan meningkat menjadi 54,32 pada tahun 2023. Nilai capaian pada tahun 2023 ini pun termasuk dalam kategori berhasil dengan realisasi indeks RB CC. Adapun nilai indeks RB ini terdiri dari komponen pengungkit berupa : pemenuhan, hasil antara area perubahan dan reformasi. serta komponen hasil yang terdiri dari : akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan publik, pemerintahan yang bersih dan bebas kkn dan kinerja organisasi.



Pada Tahun 2023 pengisian RB terdiri dari 2 komponen utama yaitu RB General dan RB Tematik yang diinput melalui website <https://portalrb.menpan.go.id/>. Berdasarkan hasil evaluasi LKE Kemenpan RB terdapat beberapa catatan dan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti untuk meningkatkan nilai indeks RB Kabupaten Bima kedepannya. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bima selanjutnya akan melakukan perbaikan atas rekomendasi tersebut serta melakukan sosialisasi kepada Perangkat Daerah terkait untuk bersungguh-sungguh dalam meningkatkan capain indicator penilaian RB baik pada RB Regular maupun RB Tematik.

SASARAN KE - 6 Terciptanya Pelayanan Publik Yang Profesional Prima Dan Berkualitas

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Ket
Opini BPK	WTP	WTP	100	Berhasil
Nilai Sakip	B	B	100	Berhasil
Persentase pencegahan korupsi	85	86,99	102,35	Sangat berhasil
Indek keterbukaan informasi	85	58	68,24	cukup berhasil

Sumber : Setda, Bappeda dan Inspektorat, 2023

Capaian kinerja sasaran ke - 6 terciptanya pelayanan publik yang profesional prima dan berkualitas adalah berhasil dengan 2 indikator berhasil, 1 indikator sangat berhasil, dan 1 indikator cukup berhasil.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023

Secara keseluruhan capain indicator sasaran ini berhasil dengan didukung oleh anggaran sebesar Rp18.955.037.349 dan terealisasi sebesar Rp18.501.154.936.

Adapun rincian capaian masing-masing indicator sebagai berikut :

1. Opini BPK

Opini atas audit BPK untuk Kabupaten Bima pada Tahun 2023 atas Laporan Keuangan Tahun 2021/22 adalah “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Sampai dengan masa akhir periode RPJMD Tahun 2016 – 2021 dan awal periode RPJMD Tahun 2021 – 2026 Pemerintah Kabupaten Bima kembali meraih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bima telah menunjukkan konsistensi dan komitmen dalam mengelola keuangan yaitu Laporan Keuangan (LK) telah tersaji secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum.

2. Nilai Sakip

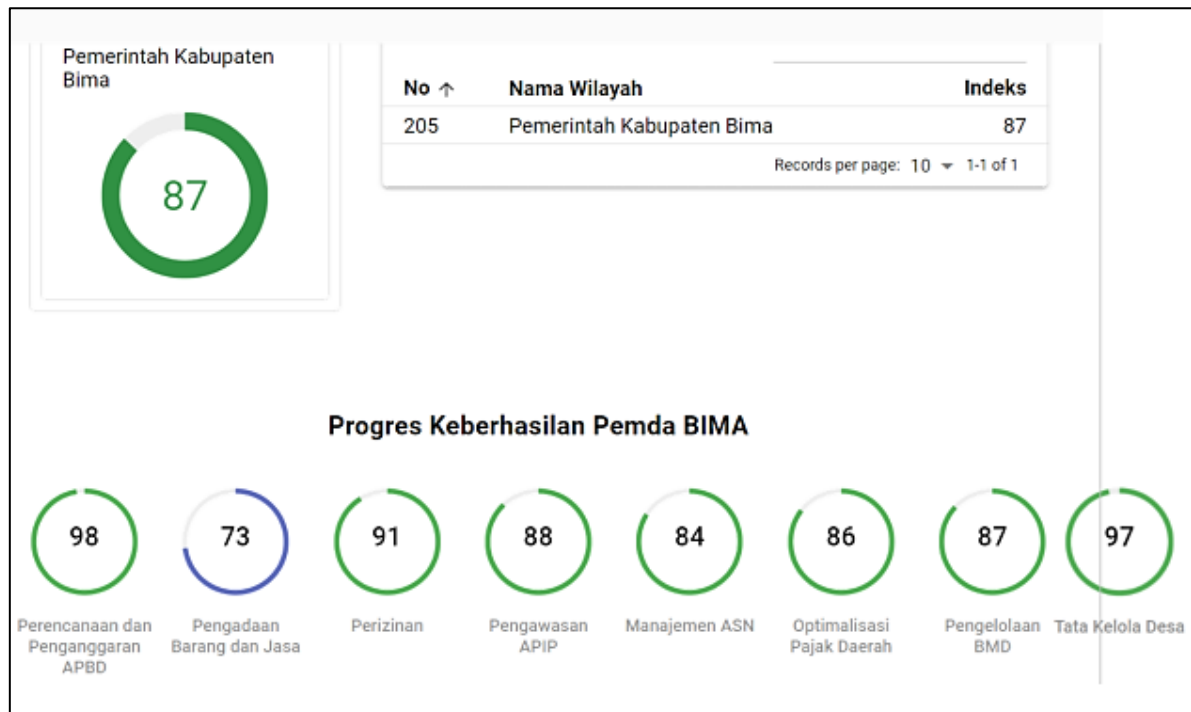
Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang berorientasi hasil, adalah dengan dilakukan suatu evaluasi terhadap implementasi SAKIP sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Kabupaten Bima yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dimana evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2023 masih belum *release*, sementara untuk nilai SAKIP Kabupten Bima Tahun 2022 yaitu B (berhasil).

3. Pencegahan Korupsi

Hasil Verifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia pada tahun 2023 tingkat capaian *Monitoring Center of Prevention (MCP)* atau Aksi Pencegahan Korupsi Kabupaten Bima yaitu 86,99 % dari target 85 persen dengan capaian kinerja sebesar 102,35 persen (Sangat Berhasil). Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Kabupaten Bima Tahun 2023 menurut KPK adalah sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023

Capaian MCP KPK Tahun 2023



Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa keseluruhan komponen penilaian MCP KPK mendapatkan nilai rata-rata yang tinggi yaitu 87 baik itu pada Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, optimalisasi Pajak Daerah, Pengelolaan BMD, maupun Tata Kelola Desa.

4. Indeks Keterbukaan Informasi

Komisi Informasi Pusat (KIP) merilis data Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) periode 2023 untuk tingkat daerah dan nasional, Hasilnya, nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Kabupaten Bima tahun 2023 menurun menjadi 58 point atau capaian 68,24%, dibandingkan periode yang sama pada 2021, yakni capaian sebesar 89,63%. Hasil ini menjadikan Kabupaten Bima pada Tahun 2023 sebagai daerah dengan kategori kurang informatif.

Kinerja indikator ini ditunjang oleh Program antara lain:

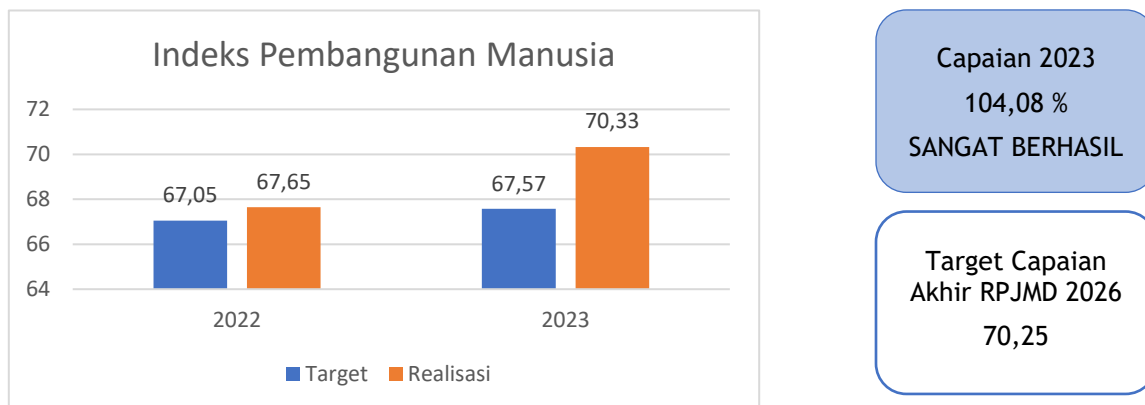
1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
3. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
4. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023

7. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
8. Program Perekonomian Dan Pembangunan
9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
10. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Upaya perbaikan kinerja untuk menunjang capaian sasaran ini terus dilakukan, salah satunya yaitu Pemerintah Kabupaten Bima telah mengaktifkan kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) atau dikenal dengan SP4N-Lapor sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan korupsi. Kedepannya efektifitas media massa sebagai sosial kontrol dan kanal SP4N-Lapor harus terus diperluas dengan melakukan sosialisasi dan percepatan penanganan pengaduan sebagai bagian dari program informasi dan komunikasi publik

TUJUAN 6. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat



Komponen IPM yang relatif paling mempengaruhi pencapaian IPM adalah pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bima senantiasa mengalami peningkatan. Posisi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bima pada tahun 2020 berada pada level 66,30 persen, Tahun 2021 menjadi 66,66 point, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 67,57 point, kemudian pada tahun 2023 meningkat menjadi 70,33. Pencapaian ini lebih tinggi dari target RPJMD 2023 sebesar 67,05 dan bahkan telah melewati dari target akhir RPJMD yaitu 70,25.

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia ini disebabkan oleh terus membaiknya pelayanan pada bidang pendidikan dengan indikator angka rata-rata lama sekolah yaitu 8,19 tahun, harapan lama

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023

sekolah yaitu 13,56, bidang kesehatan dengan indikator angka harapan hidup sebesar 71,54 tahun dan daya beli masyarakat dengan indikator pengeluaran per kapita masyarakat yaitu Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan pada tahun 2023 penduduk Kabupaten Bima untuk makanan sebesar 587.014 rupiah dan untuk non makanan sebesar 413.426 rupiah.

SASARAN KE - 7 MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
Angka Melek Huruf (AMH)	98,7	91,46	92,66	Berhasil
Rata-Rata Lama Sekolah	7,84	8,19	104,41	Sangat Berhasil
Harapan Lama Sekolah	13,34	13,56	101,64	Sangat Berhasil
Prestasi Kepemudaan Tingkat Provinsi dan Nasional	8	3,00	37,50	Kurang Berhasil
Prestasi Atlet Tingkat Provinsi dan Nasional	11	7,00	63,64	Cukup berhasil

Sumber : Dikbudpora Tahun 2023

Capaian kinerja sasaran ke - 7 meningkatnya kualitas pendidikan pemuda dan olahraga adalah 1 indikator berhasil, 2 indikator sangat berhasil, 1 indikator cukup berhasil dan 1 indikator kurang berhasil. Pada Indicator Angka Melek Huruf (AMH) mencapai realisasi 91,46 % dengan capaian 92,66% (berhasil), indicator Rata-Rata Lama Sekolah terealisasi 8,19 tahun dengan capaian 104,41 % (sangat berhasil), dan pada indicator Harapan Lama Sekolah terealisasi 13,56 tahun atau capaian 101,64 % (sangat berhasil). Besaran anggaran yang mendukung sasaran ini yaitu Rp170.163.937.597 dan terealisasi sebesar Rp169.180.383.571.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023

Pencapaian keberhasilan pada indikator angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan harapan lama sekolah didukung oleh upaya pemerintah untuk terus melakukan perbaikan pada infrastruktur sekolah, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, serta meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan melalui pelatihan dan pengembangan profesionalisme.

Sementara itu, pencapaian di bidang olah raga yakni prestasi atlet di tingkat provinsi dan nasional turun menjadi 63,64%, begitupun Prestasi Kepemudaan Tingkat Provinsi dan Nasional hanya mencapai target 37.50%. Penurunan ini dapat terjadi karena masih kurangnya infrastruktur yang memadai dan program-program yang mampu meningkatkan prestasi, serta pada tahun 2023 para atlet masih dalam proses pelatihan kembali pasca pandemi covid-19. Untuk mengatasi penurunan prestasi tersebut, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam memperbaiki infrastruktur, mengembangkan program-program pembinaan bakat, meningkatkan kualitas pelatihan, serta memberikan dukungan yang memadai bagi atlet dan pemuda di tingkat lokal.

Program penunjang untuk indikator ini adalah:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

SASARAN KE - 8 Meningkatnya Kualitas Kesehatan

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
Angka Usia Harapan Hidup	72,93 Tahun	67,27 tahun	92,24	Berhasil
Prevalensi Balita Stunting	20,5 %	10,27%	199,61	Sangat berhasil

Sumber : Dikes Tahun 2023

Capaian kinerja sasaran ke – 8 yakni meningkatnya kualitas kesehatan mendapatkan capaian dengan kategori berhasil dan sangat berhasil. Pada indicator Angka Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk Kabupaten Bima tahun 2022 mencapai 66,87 tahun meningkat menjadi 67,27 tahun pada tahun 2023.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023

Peningkatan UHH tahun 2023 ini sejalan dengan menurunnya jumlah kasus balita stunting pada tahun 2023, dimana capaian signifikan pada indikator Prevalensi Balita Stunting yang tersealisasi sebesar 10.27% dari target RPJMD 20.5% atau Prevalensi Balita Stunting mengalami penurunan sebanyak 3,63% dari tahun 2022 dengan capaian 13,90%. Capaian ini bahkan melebihi target nasional sebesar 14% pada tahun 2024. Capaian sasaran ini didukung dengan anggaran sebesar Rp208.596.133.234 dan terealisasi sebesar Rp200.841.050.935.



Wabup Dahlan "Maksimalkan Upaya Pengurangan Angka Stunting"

Keberhasilan sasaran ini dipengaruhi oleh peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan mulai membaiknya kondisi perekonomian akibat meningkatnya penghasilan masyarakat dari sektor pertanian dan peternakan, adanya sosialisasi yang terus diselenggarakan oleh pemerintah terkait pentingnya hidup sehat dan juga adanya kegiatan pertemuan untuk melakukan review kinerja stunting guna memaksimalkan Upaya penurunan angka stunting.

Upaya perbaikan kinerja untuk menunjang tercapainya sasaran meningkatnya kualitas hidup masyarakat dilakukan dengan terus melanjutkan berbagai upaya kompresensif terutama melalui sinergitas program lintas sektor konvergensi penurunan angka stunting yang dipimpin oleh Bappeda Kabupaten Bima serta secara teknis didukung oleh inovasi Gebrak bimatika, yaitu sebuah Gerakan Bersama Kabupaten Bima Anti Stunting, Kekurangan gizi dan Anemia.

Gebrak bimatika ini ditingkat desa bahkan diterjemahkan melalui inovasi pemberian Dana Insentif Desa atau DINDA yang salah satu komponennya adalah perencanaan dan penganggaran kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak dalam APBD Desa.

Kedua inovasi Gebrak Bimantika dan Dinda mendapatkan predikat penghargaan Kemenpan-RB sebagai top terpuji 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun berturut-turut pada tahun 2020 dan 2021.

Program penunjang untuk indikator ini adalah:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023**

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

SASARAN KE - 9 Terwujudnya Pemerintahan Dan Masyarakat Inovatif

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
Indeks Inovasi Daerah	40	29,80	74,5	Cukup Berhasil

Sumber : BAPPEDA, 2023

Indikator Indeks inovasi daerah kabupaten bima mencapai 29,80 point dari target 40 point atau capaian 74,5 (cukup berhasil), realisasi ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 39,87 point. Capaian indicator ini didukung dengan anggran sebesar Rp287.415.350,00 dan terealisasi Rp281.515.140,00. Berikut table rekapan penilaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bima Tahun 2023:

Rekapan Penilaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bima Tahun 2023

NO.	NAMA INOVASI	OPD	SKOR by APLIKASI	NILAI IID		URUTAN PENGHARGAAN		KETERANGAN
				BY APLIKASI	BY DEPDAGRI	PROVINSI	NASIONAL	
1	Dana Insentif Desa (DINDA)	DPMDES	102,00	60,36	29,80	10	309	KURANG INOVATIF
2	Jangkarmas (Jaringan Komunikasi Dan Informasi Masyarakat) untuk Pengontrolan Pemberian Obat Pada Penyakit Kronis	DIKES (UPT PKM LANGGUDU TIMUR)	98,00					
3	Gebrak Bimantika, Gerakan Bersama Kabupaten Bima Anti Stunting Kekurangan Gizi dan Anemia	DIKES	104,00					
4	Desa Unggul (Pertanian Sensitif Gizi)	DPMDES	94,00					
5	SI PERKASA PLUS (Sistem Informasi Pelatihan Berbasis Kompetensi, Pendampingan dan Penyediaan Sarana Usaha)	DISNAKERTRANS	92,00					
6	CSR 05 Si Beton Hijau	PU DAN PR	97,00					
7	SIM CANTIK (SURAT IJIN MENIKAH CALON PENGANTIN DARI KESEHATAN)	DIKES (UPT PKM LANGGUDU)	102,00					
8	PAPA UNTUK MAMA	DINAS DUKCAPIL	95,00					
9	GEMAR Literasi (Gerakan Masyarakat Sadar Literasi)	DIKBUDPORA	102,00					
10	Sistem Informasi Bima Satu Data (SIBISA)	DINAS KOMINFOTIK	102,00					
11	Go Segitiga Emas (Gerakan Ecobrick untuk Sehatkan Gigi, Tingkatkan Gizi Anak dan Eliminasi Sampah)	DIKES (UPT PKM PALIBELO)	100,00					
12	LAYANI SEGERA DT3	DIKES	98,00					

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023

Berdasarkan table tersebut terlihat bahwa capaian nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bima pada tahun 2023 penilaian dari penilaian Kementerian Dalam Negeri adalah 29,80 point (kategori kurang inovatif) dengan jumlah inovasi yang dinilai sebanyak 12 inovasi.

Dari 12 inovasi tersebut, beberapa diantaranya telah mendapat penghargaan dari Kemenpan RB RI. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bima meraih penghargaan Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Kemenpan RB melalui inovasi Desa Unggul (Pertanian Sensistif Gizi). Keberhasilan ini melanjutkan tradisi penghargaan serupa yakni penghargaan pada tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2022, dimana Kabupaten Bima mencapai hatrick masuk dalam kategori Top terpuji 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Kemenpan RB melalui SiMawar, Gebrak bimantika dan Dinda.

Adapun Upaya Pemerintah Kabupaten Bima dalam meningkatkan Indeks Inovasi Daerah yaitu dengan membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) yang saat ini sedang dibahas di Tingkat Pansus DPRD Kabupaten Bima. Pembentukan BRIDA ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bima dalam meningkatkan dan mengembangkan inovasi di Pemerintah Kabupaten Bima.

Program yang mendukung capaian ini adalah Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan kegiatannya yaitu Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.

SASARAN KE - 10 Terwujudnya pembangunan yang inklusif dan setara

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
Indeks Pembangunan Gender	94 point	92,2 point	98,09%	Berhasil

Capaian indicator kinerja indeks pembangunan gender Kabupaten Bima meraih realisasi 92,2 point dari target 94 point dengan capaian 100% (kategori berhasil). Capaian ini lebih tinggi daripada capaian yang diperoleh oleh Provinsi NTB yaitu 91,39 point.

Keberhasilan pencapaian indikator ini, salah satunya didukung melalui program inovasi Si Mawar. Si Mawar merupakan program aplikasi yang mendapatkan penghargaan inovasi Top 45 pada tahun 2019 dan kegiatannya terus dilaksanakan tiap tahun hingga tahun 2023 ini. Aplikasi Si Mawar tersebut merupakan wahana bagi warga untuk menyampaikan informasi atau laporan terkait gender.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023

Sehingga program ini dapat menjadi upaya Perbaikan Kinerja untuk menunjang indeks pembangunan gender selain melalui program Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan, Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan

Inovasi pelayanan publik Simawar (Sistem Informasi Warga) adalah suatu inovasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bima melalui DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana) yang berfokus pada pelaporan kasus kekerasan perempuan dan anak, usaha perempuan, pelaporan difabel, dan perempuan inspirasi.

Program penunjang untuk pencapaian indikator ini adalah :

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program perlindungan perempuan
3. Program pengelolaan sistem data gender dan anak

Sedangkan upaya perbaikan yang akan dilakukan antara lain adalah:

1. Melakukan pengembangan inovasi Si Mawar yang bertujuan untuk memudahkan pelayanan terhadap pelaporan dan pengembangan atau pembangunan yang responsive gender di Kabupaten Bima
2. Mendorong kompetisi inovasi pelayanan publik dan inovasi masyarakat di tingkat kabupaten dan desa sehingga budaya inovatif tidak saja menjadi tujuan pemerintah namun menjadi kebiasaan dan kebanggaan masyarakat Bima.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023**

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan ini mencatat dan menyajikan anggaran yang telah dialokasikan untuk berbagai kegiatan dan program oleh instansi Pemerintah Kabupaten Bima yang mencakup alokasi dana untuk berbagai sektor dan tujuan, serta rincian realisasi anggaran untuk setiap kegiatan atau program yang telah direncanakan pada tahun tahun 2023. Alokasi anggaran ini berguna dalam menunjang pencapaian kinerja indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2023 melalui pelaksanaan program atau kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran dalam mewujudkan capain kinerja Kabupaten Bima Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Realisasi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Kabupaten Bima Tahun 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Membentuk masyarakat yang beriman, berilmu dan berahlak mulia	1. Terwujudnya sikap perilaku keagamaan yang inklusif toleran dan egaliter	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	3.347.600.000	3.327.260.000	99,39
			Program Pembinaan Perpustakaan	168.100.000	166.047.560	98,78
			Program Pengembangan Kebudayaan	184.000.000	183.539.500	99,75
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	151.000.000	141.990.000	94,03

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	%
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	13.191.420.000	12.885.401.603	97,68
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.031.903.565	1.005.563.443	97,45
TOTAL				18.074.023.565	17.709.802.106	97,98
2	Meningkatkan ketertiban dan perlindungan Masyarakat	2. Terciptanya masyarakat yang sadar hukum dan tertib sosial	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	17.553.500.000	17.455.634.000	99,44
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.676.500.000	1.617.410.000	96,48
			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.636.283.780	1.246.289.300	76,17

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	%
			Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	600.392.000	599.361.870	99,83
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	278.500.000	270.911.660	97,28
TOTAL				21.745.175.780	21.189.606.830	97,45
3	Menurunkan angka kemiskinan dan meningkatnya ketersediaan lapangan kerja	3. Terwujudnya sentra sentra ekonomi berbasis komoditi unggulan	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	40.000.000	39.322.000	98,31
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	115.700.000	115.239.000	99,60
			Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	458.350.000	457.458.000	99,81
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	406.770.000	406.770.000	100,00
			Program Pemberdaya	361.250.000	360.141.000	99,69

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	%
			an Dan Perlindungan Koperasi			
			Program Pemberdaya an Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	218.300.000	216.532.000	99,19
			Program Pengembang an UMKM	848.900.000	847.121.000	99,79
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5.438.528.300	5.378.898.200	98,90
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	9.762.564.000	9.679.638.600	99,15
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	51.499.900	51.016.100	99,06
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	456.069.000	454.397.500	99,63
			Program Penyediaan	3.898.886.050	3.852.996.736	98,82

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	%
			Dan Pengembangan Sarana Pertanian			
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	32.921.064.292	32.096.897.052	97,50
			Program Penyuluhan Pertanian	5.180.738.177	5.129.750.177	99,02
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.898.886.050	3.852.996.736	98,82
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	32.921.064.292	32.096.897.052	97,50
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	469.644.500	457.233.420	97,36
			Program Penyuluhan Pertanian	65.000.000	63.975.000	98,42

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	%
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.241.534.016	1.235.329.520	99,50
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	219.269.000	218.102.700	99,47
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	287.123.000	284.214.450	98,99
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.446.424.225	1.424.904.700	98,51
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	13.000.000	12.935.000	99,50
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	341.500.000	336.056.350	98,41

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	%
			Program Pemasaran Pariwisata	443.000.000	397.728.150	89,78
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	106.498.000	102.397.270	96,15
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	239.941.000	222.679.270	92,81
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	3.038.329.950	2.976.301.831	97,96
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	57.610.000	57.610.000	100,00

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	%
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	316.107.000	314.630.200	99,53
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	168.713.000	166.703.000	98,81
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	57.600.000	55.884.000	97,02
			Program Pemberdayaan Sosial	825.826.650	824.133.054	99,79
			Program Rehabilitasi Sosial	392.320.700	388.425.237	99,01
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	415.008.750	409.934.428	98,78
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	766.882.800	750.912.700	97,92
			Program Penempatan Tenaga Kerja	863.940.350	854.079.650	98,86

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	%
			Program Hubungan Industrial	208.311.250	205.744.250	98,77
			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1.187.753.100	1.177.252.700	99,12
TOTAL				110.149.907.352	107.973.238.033	98,02
4	Meningkatnya ekonomi berdaya saing	4. Terpenuhinya infrastruktur dasar sebagai penunjang pengembangan ekonomi yang berbasis tata ruang dan lingkungan	Program Penyelenggaraan Jalan	65.401.393.341	60.426.203.350	92,39
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	10.221.253.292	9.987.765.832	97,72
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	21.078.316.500	20.369.723.637	96,64
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	24.031.910.500	23.990.098.419	99,83
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	44.379.000	35.954.560	81,02
			Program Pengendalian	304.750.000	300.396.000	98,57

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	%
			Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	75.120.000	68.340.800	90,98
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	20.100.000	20.074.160	99,87
			Program Pengelolaan Persampahan	2.385.035.000	2.361.580.522	99,02
			Program Penanggulangan Bencana	1.252.872.500	1.245.716.650	99,43
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran	3.437.516.100	3.407.583.358	99,13

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	%
			Dan Penyelamatan Non Kebakaran			
			Program Penanganan Bencana	327.226.000	324.903.850	99,29
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.272.600.000	1.269.900.000	99,79
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	158.000.000	152.425.000	96,47
		5. Terwujudnya kebijakan yang mempermudah investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	215.413.000	197.100.320	91,50
			Program Promosi Penanaman Modal	179.587.000	178.693.757	99,50
			Program Pelayanan Penanaman Modal	400.000.000	398.927.611	99,73
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	438.700.000	368.177.500	83,92

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	%
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	25.000.000	25.000.000	100,00
TOTAL				131.269.172.233	125.128.565.326	95,32
5	Mewujudkan aparatur pemerintah yang baik dan bersih	6. Terciptanya pelayanan publik yang profesional prima dan berkualitas	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.433.431.800	3.376.782.500	98,35
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	647.524.000	614.971.881	94,97
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.003.983.199	967.285.133	96,34
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.955.000.000	2.831.732.737	95,83
			Program Pengelolaan	4.460.399.650	4.353.403.759	97,60

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	%
			Keuangan Daerah			
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.233.337.950	2.209.593.561	98,94
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.416.794.500	2.392.087.846	98,98
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	546.000.000	536.099.080	98,19
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	426.000.000	389.673.773	91,47
			Program Informasi Dan Komunikasi Publik	832.566.250	829.524.666	99,63
TOTAL				18.955.037.349	18.501.154.936	97,61
6	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	7. Meningkatkan kualitas pendidikan, pemuda dan olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan	160.697.037.597	160.045.260.071	99,59
			Program Pengembangan Kapasitas	621.900.000	585.452.500	94,14

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	%
			Daya Saing Kepemudaan			
			Program Pengembang an Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	8.845.000.000	8.549.671.000	96,66
		8. Meningkatnya kualitas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	92.977.255.638	89.121.082.938	95,85
			Program Pemberdaya an Masyarakat Bidang Kesehatan	1.732.086.000	1.727.424.000	99,73
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	25.197.171.777	24.830.565.651	98,55
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.194.302.399	82.003.770.116	96,25

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	%
			Kabupaten/Kota			
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3.495.317.420	3.158.208.230	90,36
		9. Terwujudnya Masyarakat yang inovatif	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	287.415.350,00	281.515.140,00	97,95
		10. Terwujudnya pembangunan yang inklusif dan setara	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	695.000.000	695.000.000	100,00
			Program perlindungan perempuan	294.500.000	270.656.283	91,90
			Program pengelolaan sistem data gender dan anak	11.500.000	11.441.000	99,49
TOTAL				380.048.486.181	371.280.046.929	97,69

Sumber : BPKAD Tahun 2023

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023**

3.4 ANALISIS EFISIENSI

Efisiensi pada pelaporan ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran sasaran dengan capaian sasaran dan realisasi anggaran sasaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran sasaran dengan capaian sasaran. Dalam hal ini program pendukung sasaran tidak menjadi bagian perhitungan efisiensi.

Dari 10 (Sepuluh) Sasaran, terdapat efisiensi masing-masing sebagai berikut:

NO	SASARAN	ANGGARAN	REALIASASI	EFISIENSI (%)
1.	Terwujudnya sikap perilaku keagamaan yang inklusif toleran dan egaliter	18.074.023.565	17.709.802.106	2,02
2.	Terciptanya masyarakat yang sadar hukum dan tertib social	21.745.175.780	21.189.606.830	2,55
3.	Terwujudnya sentra sentra ekonomi berbasis komoditi unggulan	110.149.907.352	107.973.238.033	1,98
4.	Terpenuhinya infrastruktur dasar sebagai penunjang pengembangan ekonomi yang berbasis tata ruang dan lingkungan	130.010.472.233	123.960.666.138	4.65
5.	Terwujudnya kebijakan yang mempermudah investasi	1.258.700.000	1.167.899.188	7,21
6.	Terciptanya pelayanan publik yang profesional prima dan berkualitas	18.955.037.349	18.501.154.936	2,39

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023**

7.	Meningkatnya kualitas pendidikan, pemuda dan olahraga	170.163.937.597	169.180.383.571	0.58
8.	Meningkatnya kualitas Kesehatan	208.596.133.234	200.841.050.935	3.72
9.	Terwujudnya Masyarakat yang inovatif	287.415.350,00	281.515.140,00	2.05
10.	Terwujudnya pembangunan yang inklusif dan setara	1.001.000.000	977.097.283	2.39

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Bima Tahun 2023 sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi atas kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. LKjIP Pemerintah Kabupaten Bima menjadi bahan evaluasi capaian kinerja pada tahun anggaran 2023 serta sebagai acuan strategi dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan pembangunan di tahun 2024 dan jangka menengah sesuai arah kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026.

Hasil capaian kinerja Kabupaten Bima tahun 2023 dapat disimpulkan **Berhasil**. Adapun Hasil analisis pencapaian indikator adalah sebagai berikut :

1. Indikator Tujuan sebanyak 6 (enam), **Berhasil** sebanyak 3 (tiga) indikator dan **Sangat Berhasil** sebanyak 3 (tiga) indikator.
2. Indikator sasaran sebanyak 10 sasaran yang mencakup 27 indikator kinerja utama. dari pengelompokan indikator menurut sasaran diperoleh pencapaian indikator kinerja utama sebagai berikut:
 1. Sebanyak 1 indikator kinerja utama atau 3.70 % Kurang Berhasil
 2. Sebanyak 3 indikator kinerja utama atau 11.11 % Cukup Berhasil.
 3. Sebanyak 13 indikator kinerja utama atau 48.15 % Berhasil.
 4. Sebanyak 10 indikator kinerja utama atau 37.04 % Sangat Berhasil.
3. Secara keseluruhan capaian realisasi kinerja dari semua indikator yaitu di atas 85%. Jadi dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bima pada Tahun 2023 **Berhasil**. Keberhasilan capaian kinerja ini tentunya didukung oleh berbagai program/kegiatan serta anggaran yang sesuai.

Akhirnya, Pemerintah Kabupaten Bima menyampaikan apresiasi kepada semua pihak atas segala upaya, dukungan, kolaborasi dan atensi yang telah dilakukan untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan terutama yang mengarah pada pencapaian kinerja tahun 2023.

Upaya perbaikan untuk mengoptimalkan hasil ini akan terus dilakukan bersama seluruh *stakeholder* melalui sinergi dan kolaborasi mewujudkan **Visi Bima yang RAMAH** ; Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal.